

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemrosesan ekonometrika dan pembahasan mendalam mengenai determinansi PDRB Per Kapita, Belanja Daerah, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Ketimpangan Pendapatan di 6 Provinsi se-Pulau Jawa kurun waktu 2016–2025 menggunakan spesifikasi *Fixed Effect Model* (FEM), ditarik beberapa poin kesimpulan utama:

1. Pengaruh PDRB Per Kapita terhadap Ketimpangan Pendapatan

PDRB Per Kapita memberikan pengaruh positif namun tidak signifikan secara parsial terhadap Ketimpangan Pendapatan pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Temuan ini mengonfirmasi bahwa akselerasi output perekonomian daerah belum terealisasi secara inklusif, sehingga manfaat pertumbuhan masih dominan terakumulasi pada kelompok masyarakat pemilik modal dan sektor formal urban.

2. Pengaruh Belanja Daerah terhadap Ketimpangan Pendapatan

Instrumen Belanja Daerah berasosiasi positif namun tidak signifikan secara parsial terhadap Ketimpangan Pendapatan. Kondisi tersebut berakar dari belum optimalnya transmisi fungsi redistribusi APBD, di mana postur pengeluaran pemerintah masih sangat terfokus pada beban Belanja Operasional/Pegawai ketimbang alokasi Belanja Modal maupun program sosial yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat kelas bawah.

3. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Ketimpangan Pendapatan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbukti berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap Ketimpangan Pendapatan pada taraf alfa 5%. Parameter koefisien senilai $-0,4813$ menandakan bahwa setiap kenaikan IPM sebesar 1 unit secara empiris mampu menekan Rasio Gini senilai $0,4813$ unit. Hal ini menegaskan bahwa akselerasi kualitas modal manusia melalui domain pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak bertindak sebagai determinan kunci yang paling transformatif dalam memperkecil jurang disparitas.

4. Pengaruh Secara Simultan

Secara kolektif (simultan), variabel PDRB Per Kapita, Belanja Daerah, dan IPM berpengaruh signifikan terhadap dinamika Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa. Perolehan koefisien determinasi (R^2) sebesar $0,7570$ mengindikasikan bahwa 75,70% variasi angka Rasio Gini berhasil dijelaskan oleh ketiga variabel penjelas tersebut, sedangkan sisanya sebesar 24,30% dipengaruhi oleh faktor eksogen lain di luar kerangka pemodelan penelitian.

5.2 Implikasi Kebijakan

Merujuk pada temuan empiris di atas, dirumuskan beberapa rekomendasi implikasi kebijakan strategis bagi Pemerintah Daerah di lingkup Provinsi se-Pulau Jawa:

1. Fokus pada Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Pemerintah daerah perlu mereorientasi paradigma pembangunan dari yang berfokus pada target pertumbuhan PDRB kuantitatif menuju pemerataan

kesempatan ekonomi. Langkah ini direalisasikan melalui penguatan kapasitas UMKM serta modernisasi sektor pertanian/perdesaan guna mencegah sentralisasi aglomerasi ekonomi di pusat metropolitan.

2. Reorientasi Alokasi APBD

Pemerintah daerah disarankan melakukan penataan ulang struktur anggaran dengan mereduksi belanja operasional rutin dan mengalokasikannya pada Belanja Modal infrastruktur produktif serta jaring pengaman sosial yang menysar langsung kelompok masyarakat rentan (*targeted spending*).

3. Peningkatan Investasi Modal Manusia

Meningkat modal manusia merupakan instrumen paling efektif dalam mereduksi ketimpangan, pengalokasian anggaran sektor pendidikan dan kesehatan mutlak dioptimalkan guna mengeskalasi kapabilitas serta daya saing sumber daya manusia di lapisan masyarakat bawah.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan dan temuan empiris dalam penelitian ini, diajukan saran-saran konstruktif sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan memberikan prioritas utama pada pemerataan pembangunan manusia antarkabupaten/kota untuk mengakselerasi penurunan angka Rasio Gini secara substantif di tingkat provinsi.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

- **Analisis Efek Spesifik Individu (*Cross-Section Fixed Effects*):** Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengekstraksi dan menguraikan besaran nilai *cross-section fixed effects* dari tiap-tiap provinsi agar dapat mengidentifikasi

keunikan karakter struktural, efektivitas kebijakan lokal, serta disparitas antarwilayah di Pulau Jawa secara lebih terperinci.

- **Pengembangan Variabel Bebas:** Peneliti berikutnya dapat memperluas cakupan variabel penjelas yang relevan dengan disparitas pendapatan, seperti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Kemiskinan, Penanaman Modal Asing/Dalam Negeri (PMA/PMDN), maupun Upah Minimum Provinsi (UMP).
- **Perluasan Spasial dan Metodologis:** Studi lanjutan disarankan memperluas cakupan wilayah analisis (misalnya seluruh provinsi di Indonesia) atau mengaplikasikan metode regresi dinamis seperti *Generalized Method of Moments* (GMM) untuk mengukur efek penyesuaian jangka panjang.